

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Langkah-langkah penanganan pelanggaran merek pada produk pestisida merek Dangke di Kab Kendal dan mengetahui dan mengkaji penyelesaian perkara pelanggaran/ tindak pidana merek pestisida Dangke di Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat.

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif-yuridis dan hasil penelitian adalah penegakan hukum merk melalui jalur pidana memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran merk dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang merk pestisida jenis insteksida Dangke

Hasil penelitian. langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi pelanggaran merk adalah Pasal 103 dalam UU Merek yang menjelaskan bahwa pelanggaran merek merupakan delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa diproses apabila ada laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana dalam hal ini pemegang hak merek. Delik aduan menimbulkan harusnya perhatian khusus dari pemegang hak merek untuk tetap mengawasi penggunaan mereknya. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan produk Dangke palsu dipasaran yang beredar di masyarakat. Pada intinya, langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran merek harus dilakukan juga oleh para produsen melalui pengawasan (*monitoring*) penggunaan produknya dijual ke konsumen; dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal sudah tepat karena telah memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang memberikan rasa aman terhadap pemegang hak merek.

Kata Kunci: Merek, Putusan PN Kendal Nomor 25/Pid.B/2020/PN Kdl, Pestida Dangke, UU No 20 Tahun 2016

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta

² Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the steps for handling brand violations on Dangke brand pesticide products in Kendal Regency and to find out and study the appropriate settlement of Dangke pesticide brand violation/criminal cases in the District Court.

Research result. the steps taken to deal with trademark infringement are steps to overcome trademark infringement must also be carried out by producers through monitoring (monitoring) the use of their products sold to consumers; Producers of agricultural products and medicines including pesticides, insecticides and fertilizers must register Trademarks and Service Marks/Services to the Director General of Intellectual Property Rights and settlement of violations/criminal cases of the Dangke pesticide brand at the Kendal Regency District Court are appropriate because they have provided a sense of justice, certainty and legal benefits and also provide a deterrent effect against perpetrators of criminal acts that provide sense of security for brand rights holders.

Research result. The steps taken to address trademark infringement are Article 103 in the Trademark Law which explains that trademark infringement is a complaint offense. Complaint delict is an offense that can only be processed if there is a report from a person who is a victim of a crime, in this case the trademark rights holder. The complaint delict raises the need for special attention from the trademark rights holder to keep monitoring the use of the mark. Without complaints from brand owners, it will be difficult to prevent the sale of counterfeit Dangke products in the market circulating in the community. In essence, measures to deal with trademark infringement must also be carried out by producers through monitoring the use of their products sold to consumers; and the District Court of Kendal Regency is appropriate because it has provided a sense of justice, certainty and legal benefits and also provides a deterrent effect against perpetrators of criminal acts which gives a sense of security to trademark rights holders.

Keyword(s): Brand, Kendal District Court Decision Number 25/Pid.B/2020/PN Kdl, Dangke Pesticides, UU No. 20 of 2016

³ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta

⁴ Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TESIS MAGISTER ILMU HUKUM JAKARTA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PADA
PUTUSAN PN KENDAL NO 25/PID.B/2020/PN KDL)**

Oleh :
Nama : Fiernando Andriansyah
NIM : 19/452908/PHK/10899

1. Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

Ketua

2. Niken Subekti Budi Utami, S.H.,
M.Si.

Anggota

3. Irna Nurhayati, S.H., M.Hum,
LL.M. Ph.D.

Anggota